

Pameran Seni Rupa Nusantara 2013

"META-AMUK"

7-24 Mei 2013



Pameran Seni Rupa Nusantara 2013

“META-AMUK”

Menampilkan 115 karya [perupa] pilihan dari 25 provinsi

*.....sebuah upaya untuk melampaui “amuk”, amarah, murka,
atau yang kurang lebih punya makna serupa itu.....*



Ilustrasi: "U", Mulya Gunarso, 38x200 cm, Oil on Canvas, 2012

- *Ketua Pelaksana :*
Tubagus "Andre" Sukmana

- *Penanggung Jawab :*
Zamrud Setya Negara

- *Koordinator Pameran :*
Rizky Ayu Ramadhana

- *Kurator :*
**Kuss Indarto
Asikin**

- *Penyedia Materi :*
**Tunggul Setiawan
Yakoub Surotedjo
Afrina Rosmani**

- *Publikasi dan Dokumentasi :*
**Sumarmin
Bayu Genia krisbhie
Yuswan
Abdurahman**

- *Tim Preparator :*
**Subarkah
Dadang Ruslan Ependi
Heru Setiawan
Fazriadi**

- *Designer :*
Dadang Eko Yuono

Pameran Seni Rupa Nusantara 2013
“META-AMUK”

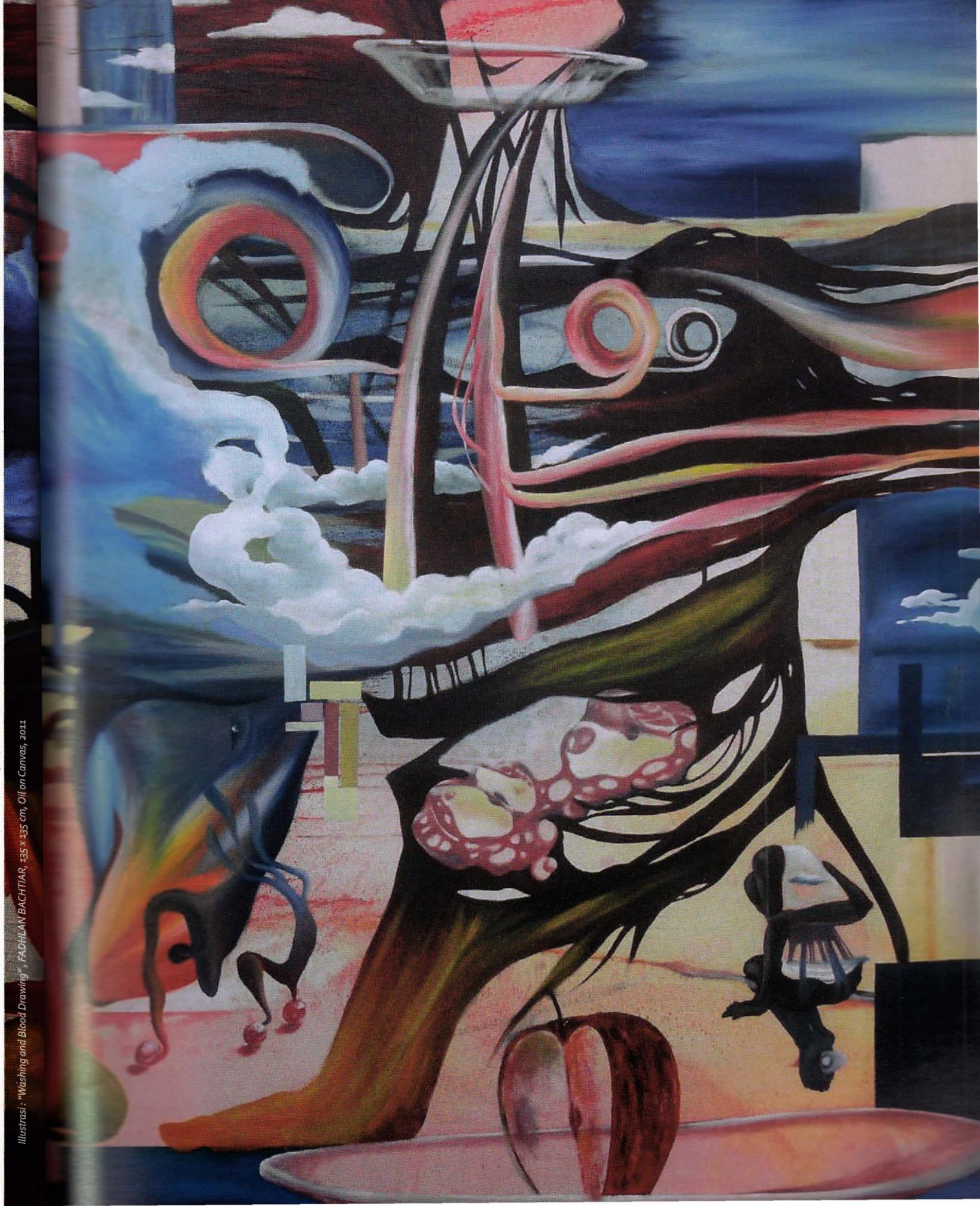
7-24 Mei 2013

Galeri Nasional Indonesia

Jl. Medan Merdeka Timur No. 14,
Jakarta Pusat
Telp. : (021) 34833954 -34833955
Fax. : (021) 3813021
Email : galnas@indosat.net.id
Website : www.galeri-nasional.or.id

Tim Kurator:
Kuss Indarto
Asikin Hasan

Ilustrasi : "Washing and Blood Drawing" - FADHLAN BACHTIAR, 135 x 135 cm, Oil on Canvas, 2011





SAMBUTAN

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Kebudayaan

Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan YME, atas karunia-Nya Pameran Seni Rupa Nusantara 2013, sebuah perhelatan dwi-tahunan yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilaksanakan dengan baik. Perhelatan berskala nasional ini, sebagai upaya pemerintah untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi potensi yang berkembang di pelbagai daerah, khususnya bidang seni rupa. Seperti penyelenggaraan Pameran Seni Rupa Nusantara sebelumnya, pameran kali ini juga menemukan bakat-bakat baru yang kelak dapat berkibrah tak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat regional, dan internasional.

Pameran Seni Rupa Nusantara 2013, yang mengambil tema "Meta Amuk", ini pada dasarnya hendak mengajak para perupa untuk yaitu "amuk" yang pada kenyatannya dapat merugikan kita bersama. Dengan demikian "Meta Amuk" adalah sesuatu yang melampaui "amuk" itu sendiri. Atau dengan kata lain, bagaimana menahan agar energi dalam bentuk amuk, dapat tersalurkan menjadi sesuatu yang positif. Dalam dunia seni rupa telah terbukti kemampuan untuk mengalihkan energi negatif menjadi positif dalam bentuk misalnya melahirkan karya-karya bernada simbolik.

Semoga pameran ini dapat memberi semangat dan inspirasi baru, terutama bagi para perupa yang datang dari pelbagai penjuru tanah air. Di samping itu, saya berharap agar pameran ini dapat dijadikan sebagai ajang tukar pendapat, saling memahami keunggulan dan kekurangan masing-masing. Dan, dari situ kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa melalui seni budaya. Selamat dan sukses untuk penyelenggara, kurator, para perupa dan semua pihak yang membantu terwujudnya perhelatan karya seni rupa modern Indonesia ini.

Jakarta, Mei 2013

Wiendu Nuryanti

PENGANTAR

Kepala Galeri Nasional Indonesia

Pameran Seni Rupa Nusantara merupakan program kegiatan dua tahunan (Biennale) yang digagas dan dilaksanakan oleh Galeri Nasional Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak penyelenggaraan yang pertama tahun 2001 – 2011, kegiatan ini ditujukan untuk lebih memperkenalkan dan memetakan potensi dan perkembangan 'seni rupa modern' di berbagai wilayah nusantara. Selama kurun waktu itu juga tercatat tidak kurang dari 350 perupa Indonesia pernah mengikuti perhelatan tersebut. Format kurasi (kuratorial) tahun 2013 ini peserta ditentukan melalui seleksi dan undangan khusus kepada beberapa perupa di seluruh wilayah Indonesia. Terkumpul sekitar 800 karya dari kurang lebih 500 seniman yang mendaftar, dan kemudian terpilih sebanyak 115 perupa dari 25 provinsi. Dari keseluruhan karya yang terpilih, diperoleh beragam media ekspresi seni: lukisan, patung, kriya, grafis, drawing, fotografi, karya instalasi dan karya video. Teristimewa, Pameran Seni Rupa Nusantara 2013: "Meta-Amuk" kali ini diselenggarakan bertepatan dengan hari jadi Galeri Nasional Indonesia ke-15, tepatnya lembaga ini didirikan pada tanggal 8 Mei 1998.

Melalui Pameran Seni Rupa Nusantara diharapkan dapat menampilkan karya-karya terbaik para perupa di tanah air, serta menjadikan karya seni budaya sebagai perwujudan tak terpisahkan dalam pembangunan karakter bangsa. Tema pameran tahun ini: "Meta-Amuk" dialamatkan pada berbagai respon kreatif dan inovatif para peserta terhadap bagaimanakah para seniman menterjemahkan secara visual dan simbolik melalui karya seni rupa mengenai persoalan tentang dunia dan tradisi kritik, protes atau perlawanan yang cukup akrab melekat dalam kondisi social kemasyarakatan kita, tanpa harus secara nyata digambarkan secara nyata / verbal. Para peserta pameran yang berasal dari berbagai daerah dengan berbagai latar belakang lingkungan budayanya tentunya dapat memperkaya dan keberagaman gagasan dan visualisasi pada karya-karyanya, tetapi masing-masing tetap memiliki keunikan dan karakter tersendiri. Pada pameran ini tidak hanya terpilih perupa yang telah dikenal dan mendapatkan perhatian dari para pengamat seni, namun juga mengumpulkan bakat-bakat muda terbaik yang bias memberikan kontribusi meyakinkan pada perkembangan seni rupa Indonesia di masa mendatang.

Galeri Nasional Indonesia memahami kegiatan dua tahunan Pameran Seni Rupa Nusantara di Jakarta maupun kegiatan tahunan Pameran Keliling di berbagai kota dan provinsi, hanyalah satu upaya untuk terus merangsang iklim dialog positif serta produktif diantara berbagai perkembangan seni rupa antar daerah di seluruh wilayah Indonesia. Kerjasama yang baik antara Galeri Nasional Indonesia dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang seni rupa, seperti para perupa, curator, akademisi, pemerhati, pecinta dan wartawan budaya serta galeri, lembaga atau komunitas, pada gilirannya akan menggairahkan semangat berkarya dan menumbuhkan apresiasi seni rupa di masyarakat luas, sehingga perkembangan seni rupa Indonesia semakin tumbuh dan meluas seantero Nusantara. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mampu merealisasikan perhelatan ini. Selamat Berpameran!

Jakarta, Mei 2013

Tubagus 'Andre' Sukmana

“META-AMUK”

SECARA historis, “tradisi” mengkritik, atau protes sebagai bagian dari sebuah perlawanan telah muncul sejak lama. Tapa pepe atau bertapa dengan jalan berjemur diri di bawah panas sinar matahari adalah contoh kasus yang pernah terjadi pada zaman Majapahit. Dalam novel “Gajah Mada”, penulis Langit Kresna Hariadi mengisahkan bahwa Raja Majapahit kala itu, Ra Kuti, mendapatkan tampuk kekuasaan dengan cara-cara yang dianggap rakyat tidak sah. Lewat intrik dan jalan kelicikan, Ra Kuti merebut kursi kerajaan dari Raja Jayanegara. Ra Kuti memang bukan orang lama dalam pemerintahan. Dia memiliki jabatan elit di kerajaan, yakni sebagai anggota Dharmaputera.

Kenyataan itu membuat geram rakyat. Selain meraih kekuasaan dengan cara yang tidak sah, kebijakan yang dibuatnya juga merugikan rakyat. Sistem ekonomi kacau balau dan terjadi krisis pangan yang luar biasa. Maka, rakyat memberontak dengan menggelar aksi tapa pepe. Sayangnya, ketika tapa pepe digelar, Ra Kuti mengerahkan pasukan dan menyapu demonstran dengan kekerasan. Namun sejarah mencatat, tak lama setelah itu, Ra Kuti berhasil digulingkan. Inilah gambaran kecil betapa tapa pepe sebagai bentuk perlawanan rakyat telah ada dalam sejarah kultur demokrasi ala Nusantara.

Tapa pepe ini juga terjadi atau berlanjut sebagai kebiasaan yang muncul di bentang waktu berikutnya dan di kawasan lain, seperti di masa pemerintahan kerajaan Mataram (Islam) hingga pecah menjadi Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta.

Di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta, tradisi dan kegiatan protes tidak hanya dilakukan secara berkelompok, tetapi juga secara perorangan. Tempat untuk menggelar aksi protes pun sudah disiapkan secara khusus. Tempat aksi protes acap kali dilakukan di alun-alun keratin, atau halaman depan istana raja.

Protes ini tidak dianggap “pembangkangan” terhadap raja. Sebab, dengan posisi raja sebagai “pengembang keadilan”—perwujudan Ratu Adil, maka aksi protes atau tapa pepe itu dianggap sah dan diakui sebagai hak dasar rakyat. Menariknya, sekalipun pelaku *tapa pepe* hanya perorangan, tak jarang raja langsung merespons dengan memanggil dan menanyakan maksudnya.

Selain di Jawa, tradisi protes dan kebebasan berpendapat juga dikenal oleh masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Sejarawan Bugis, Prof. Dr. Mattulada bahkan mencatat bahwa hak protes dalam masyarakat Bugis sudah diatur dalam sistem dan norma. Salah satu prinsip demokrasi Bugis, yang sudah dijalankan jauh sebelum Eropa mengenal terminologi demokrasi, adalah konsep “kedaulatan rakyat”, seperti tersirat di bawah ini:

*Rusa taro arung, tenrusa taro ade,
Rusa taro ade, tenrusa taro anang,
Rusa taro anang, tenrusa taro tomaega.*

(Batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat; Batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum; Batal ke-



tetapan kaum, tidak batal ketetapan Rakyat banyak)

Orang Bugis juga sudah mengenal konsep "kemerdekaan manusia" (*amaradekangeng*). Ini ditulis dengan jelas dalam Lontarak, naskah kuno beraksara Bugis-Makassar. Di situ sudah tertulis prinsip berikut:

*Niaa riasenngé maradéka, tellumi pannessai:
Sevani, tenrilawai ri olona.
Maduanna, tenriangkai' riada-adanna.
Matellunna, tenri atteanngi lao ma-niang,
lao manorang, lao orai, lao alau, lao ri ase, lao ri awa.*

(Yang disebut merdeka (bebas) hanya tiga hal yang menentukannya: pertama, tidak dihalangi kehendaknya; kedua, tidak dilarang mengeluarkan pendapat; ketiga tidak dilarang ke Selatan, ke Utara, ke Barat, ke Timur, ke atas dan ke bawah. Itulah hak-hak kebebasan)

Dalam pengakuan mengenai "Hak Protes", masyarakat Bugis sudah mengaturnya dalam sistim adat. Ada lima bentuk aksi protes yang dikenal oleh masyarakat Bugis:

1. *Mannganro ri ade'*: hak mengajukan petisi atau permohonan kepada raja untuk mengadakan suatu pertemuan tentang hal-hal yang mengganggu kehidupan rakyat. Ini adalah model aksi yang mirip dengan pengajuan petisi, pernyataan sikap, atau konferensi pers di jaman sekarang.
2. *Mapputane'*: hak untuk menyampaikan keberatan atau protes atas perintah-perintah yang memberatkan rakyat dengan menghadap raja. Jika itu menyangkut kelompok, maka mereka diwakili oleh kelompok kaumnya untuk menghadap raja, tetapi jika perseorangan, langsung menghadap raja. Ini model aksi yang mirip dengan metode negosiasi di jaman sekarang.
3. *Mallimpo-ade'*: protes yang dilancarkan kepada raja yang bertindak sewenang-wenang atau pejabat kerajaan lainnya. Biasanya, jalan ini ditempuh setelah metode Mapputane' menemui kegagalan. Pelaku protes Mallimpo-ade' tidak akan meninggalkan tempat protes sebelum permasalahannya selesai. Ini hampir mirip dengan model-model aksi pendudukan yang menginap sehari-hari bahkan berbulan-bulan di lokasi aksi.
4. *Mabbarata*, hak protes rakyat yang sifatnya lebih keras, yang biasanya dilakukan dengan berkumpul di balai pertemuan (*barugae*). Aksi protes ini biasanya akan meningkat menjadi perlawanan frontal (pemberontakan) andaikan raja tidak segera menyelesaikan tuntutan rakyat. Ini mirip dengan rapat akbar atau *vergadering* yang sudah dikenal sejak jaman pergerakan anti-kolonial.

5. *Mallekke' dapureng*, aksi protes rakyat yang dilakukan dengan cara berpindah ke negeri lain. Hal ini dilakukan jikalau empat metode aksi di atas gagal menghentikan kesewenang-wenangan sang Raja. Ini mirip dengan gerakan protes sekarang yang disebut "suaka politik" ke negara lain.

Dengan melihat sekelumit sejarah di atas, adalah sangat naïf, bahkan memalukan, jikalau pemerintah sekarang alergi dengan aksi protes. Sebab, aksi protes bukanlah sesuatu yang buruk, justru dipandang perlu untuk "menyehatkan pemerintahan".

KIRANYA, perca-perca contoh sederhana di atas bisa memberi gambaran betapa masyarakat telah lama memiliki tradisi untuk bersuara memberi masukan, kritik bahkan protes terhadap penguasa. Dan ruang atau sistem untuk itu juga tersedia.

Dalam dunia kreatif seni rupa, tradisi kritik, protes, atau pun perlawanan juga mendapat tempat. Kita bisa mencomot sedikit contoh untuk ditampilkan sebagai deret kecil representasi atas kecenderungan itu. Lukisan "Penaklukan Diponegoro" (1857) karya Raden Saleh Sjarief Boestaman adalah contoh legendaris betapa sang seniman sebagai nasionalis ingin memberi perlawanan kultural dengan memberi perspektif bandingan atas lukisan "Penyerahan Diri Diponegoro kepada Kapten De Kock" (1830) karya Nicolaas Pieneman.

Lebih dari seabad setelah itu, muncul karya serigrafi karya Hardi, "Presiden R.I. 2001" yang menjadi salah satu ikon Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB) sekitar tahun 1974. Karya ini telah memberi sinyal tentang otoritarianisme Soeharto yang perlu dikritisi dengan munculnya para pemimpin baru. Sosok Hardi dalam karya tersebut seperti sebuah personifikasi masyarakat yang mulai butuh pemimpin alternatif yang tidak tiranik. Sinyal itu ternyata menemu pembenaran dalam realitas politik karena Soeharto baru jatuh 24 tahun setelah karya itu dibuat, yakni tahun 1998.

Dan dalam ranah seni rupa, salah satu penanda penting dari kejatuhan rezim Soeharto dua tahun sebelum pergantian milenium itu adalah kelahiran lukisan "Berburu Celeng" gubahan Djoko Pekik. Karya tersebut menjadi penanda, komentar, sekaligus kritik betapa kepemimpinan yang lalim telah dibiarkan bertahun-tahun lamanya berkuasa dan menghabiskan sekian banyak nilai-nilai mulia yang berkembang dalam perikehidupan berbangsa.